

**PENGARUH DANA BAGI HASIL PAJAK DAN DANA BAGI HASIL SUMBER
DAYA ALAM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI KABUPATEN BERAU**

Ira Indriani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of Tax Revenue Sharing Funds and Non Tax Revenue Sharing Funds on the consumption of the Berau Regency, both partially and simultaneously. The usefulness of this research is that the benefits are expected to be able to increase scientific knowledge in economic fields specifically about profit sharing funds. The benefit of this research policy is that it is expected to be a decision making related to revenue sharing funds and furthermore this research is expected to be a reference for future researchers relating to the Tax Revenue Sharing Fund and Non Tax Revenue Sharing Fund.

The results of this study are variable Tax Revenue Sharing has a negative and significant effect on regional consumption in the District of Berau. Non-Tax Revenue Sharing Variables have a positive effect on regional consumption in the District of Berau and are not significant on regional consumption consumption in the District of Berau. Non-tax together has no effect on the regional consumption of the district of Berau.

Keywords: Tax DBH, Non Tax DBH, Regional Consumption

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Non Pajak terhadap Konsumsi daerah Kabupaten Berau baik secara parsial maupun secara simultan . Kegunaan dari penelitian ini adalah manfaat diharapkan dapat mampu menambah pengetahuan keilmuan bidang ekonomi khususnya mengenai dana bagi hasil . Secara manfaat kebijakan penelitian ini diharapkan akan menjadi pengambilan keputusan terkait dengan dana bagi hasil dan selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Non Pajak.

Hasil Penelitian ini adalah Variabel Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh negative dan signifikan terhadap konsumsi daerah Kabupaten Berau. Variabel Dana Bagi Hasil Non Pajak berpengaruh positif terhadap konsumsi daerah Kabupaten Berau dan tidak signifikan terhadap konsumsi daerah Kabupaten Berau. Variabel Dana Bagi Hasil Pajak

dan Dana Bagi Hasil Non Pajak secara bersama sama tidak ada pengaruh terhadap Konsumsi daerah Kabupaten Berau.

Kata Kunci : DBH Pajak, DBH Non Pajak, Konsumsi Daerah

Pendahuluan

Dalam hal mengatur daerahnya sendiri tentu saja suatu daerah membutuhkan dana yang tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara saja, akan tetapi juga bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah itu sendiri. Seiring dengan berlakunya otonomi daerah di Indonesia, maka perencanaan pembangunan di daerah harus direncanakan dengan baik. Pembangunan akan berjalan baik, apabila rencana penganggaran pembangunan dilakukan dengan cermat yang ditopang oleh sumber – sumber pendapatan daerah yang telah dikelola dengan baik. Menurut Kawedar, dkk (Rahmawati, 2010)

Adapun sumber dana bagi pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil (DBH) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU Nomor 23 tahun 2014) Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah atau yang didapat untuk membiayai belanja di daerahnya.

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang berasal dari pemerintah dari pemerintah pusat (APBN) yang

dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU nomor 33 tahun 2004), tentang dana peimbangan keuangan antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang terdiri dari 2 jenis yaitu DBH Pajak dan DBH Non Pajak (Wahyuni & Adi, 2009)

Berdasarkan UU PPh yang terbaru (UU nomor 17 tahun 2000), mulai tahun anggaran 2001 Daerah memperoleh dana bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (personal Income tax), yaitu PPh pasal 21 dan PPh pasal 25/29 orang pribadi. Ditetapkannya PPh perorangan sebagai objek bagi hasil dimaksudkan sebagai kompensasi dan penyeleksi bagi daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam, tetapi memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan APBN.

Volume perolehan pajak daerah berasosiasi kuat dengan besarnya tingkat pendapatan sebagai basis pajak. Dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase

tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil.

Menurut UU nomor 32 tahun 2004, disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan dana bagi hasil non pajak (SDA). Kebijakan penggunaan dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah.

Konsumsi menurut T.Gilarso (2003), pengertiannya adalah titik pangkal dan tujuan akhir dari keseluruhan kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan menurut Kamus Besar Ekonomi Indonesia adalah tindakan manusia untuk menghabiskan dan mengurangi (utility) suatu benda baik secara langsung atau tidak langsung pada pemuasan terakhir kebutuhan hidupnya.

Untuk itu pemerintah membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja yang akhirnya kita sebut sebagai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berlaku untuk satu tahun fiskal.

Untuk memperoleh barang dan jasa, pemerintah Kabupaten Berau mengeluarkan sejumlah Dana. Besar kecilnya tergantung pada macam, banyak dan tingkat harga barang dan jasa yang dibutuhkan. Berdasarkan pembahasan tersebut peneliti mengambil judul "Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Non Pajak Terhadap Konsumsi Daerah Kabupaten Berau."

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan, sebagai berikut:

- 1) Apakah dana bagi hasil pajak berpengaruh terhadap konsumsi daerah di Kabupaten Berau ?
- 2) Apakah dana bagi hasil non pajak berpengaruh terhadap konsumsi daerah di Kabupaten Berau ?
- 3) Apakah dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil non pajak berpengaruh secara simultan terhadap konsumsi daerah di Kabupaten Berau ?

Kajian Teori

Ekonomi Publik

Ekonomi publik adalah studi tentang kebijakan pemerintah melalui lensa efisiensi ekonomi dan pemerataan. Pada tingkat yang paling dasar, ekonomi publik memberikan kerangka untuk berpikir tentang apakah pemerintah harus berpartisipasi dalam pasar ekonomi dan sejauh mana peran pemerintah seharusnya. Ekonomi publik juga mempelajari akan peran pemerintah dalam menyediakan barang-barang publik yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta.

Teori Ekonomi Makro

Ekonomi dapat diartikan sebagai suatu ilmu ekonomi yang mempelajari tentang usaha manusia dalam kegiatannya memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Adapun kegiatan yang dilakukan manusia dalam usahamemenuhi kebutuhannya meliputi

produksi, distribusi dan konsumsi. Soelistyo menyatakan pengertian ekonomi makro adalah mengkaji perilaku ekonomi sebagai satu kesatuan besar yang bersifat agregatif seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, neraca pembayaran, uang dan sebagainya.

Boediono menyatakan bahwa pengertian ekonomi makro adalah satu cabang dari ilmu ekonomi yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan tertentu, yaitu permasalahan kebijakan makro.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah otonom sebagai salah satu wujud dari komitmen antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi fiskal. Dana perimbangan terdiri dari dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta transfer lainnya (Dana perimbangan dari provinsi) yang terdiri dari dana penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan terjadi menjadi Tanggungjawab daerah dapat di biyai dari bantuan keuangan tersebut. Penjelasan lebih detailnya dibawah ini, jumlah Dana perimbangan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan dana tersebut ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Deddy, 2007). Menurut buku dasar penyusunan APBD 2012, bagi pemerintah daerah yang mendapatkan dana bagi hasil yang cukup besar, seyogyanya pemanfaatan dana tersebut dilakukan secara optimal dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur dasar daerah. Dana Bagi Hasil terbagi menjadi dua yaitu :

Dana bagi Hasil Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan pasal 25 / 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Penetapan alokasi dana bagi hasil pajak ditetapkan oleh menteri keuangan.

Dana bagi hasil pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Dana Bagi Hasil Non Pajak (Sumber Daya Alam) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentasi tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh

hubungan antara variabel.. tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dan variabel terikat.

Penelitian ini menjelaskan hubungan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Dana Bagi Hasil Non Pajak terhadap konsumsi daerah kabupaten baerau.

Pembahasan

Uji Analisis Linier Berganda

Pengaruh dana bagi hasil pajak dan non pajak terhadap konsumsi daerah Kabupaten Berau

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	
1	(Const	2876808708,7	280065525,5	
	ant)	35	97	
	X1	-,020	,006	-1,133
	X2	,001	,000	,699

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan table diatas pengaruh masing – masing variable independen yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak (X1) dan Dana Bagi Hasil Non Pajak (X2) dan variable indogen Y dapat diketahui persamaan sebagai berikut :

$$Y = 2876808708,73 - 0,020X1 + 0,001X2$$

Berdasar model persamaan yang diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nilai Konstanta sebesar 286808708,73 menunjukkan bahwa dalam keadaan variabel Dana Bagi Hasil Pajak (X1) dan Dana Bagi Hasil Non

Pajak (X2) bernilai nol, maka Konsumsi Daerah akan bernilai 2876808708,73.

Koofisien Dana Bagi Hasil Pajak (X1) sebesar 0,020 artinya jika variabel eksogen bernilai tetap dan Dana Bagi Hasil Pajak mengalami kenaikan 1 % maka konsumsi daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,020%. Koefisien bersifat negative artinya terjadi hubungan negatif antara Dana Bagi Hasil Pajak terhadap konsumsi daerah maka akan menurun pula konsumsi daerah di Kabupaten Berau.

Koofisien Dana Bagi Hasil Non Pajak (X2) sebesar 0,001 artinya jika variable eksogen lainnya bernilai tetap dan Dana Bagi Hasil Non Pajak mengalami kenaikan sebesar 1 % 0,001% . Koofisien bernilai positif antara Dana Bagi Hasil Non Pajak terhadap konsumsi daerah artinya terjadi hubungan positif , dimana semakin naik Dana Bagi Hasil Non Pajak maka konsumsi pemerintah akan meningkat di Kabupaten Berau

Pengaruh secara simultan dan keeratan hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependent dapat dilihat dari nilai koefisien kolerasi (R) serta analisis koefisien determinan digunakan untuk menunjukkan proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen . R² mampu memberikan informasi mengenai variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi yang digunakan . Nilai R dan R² mendekati angka satu berarti terdapat hubungan yang kuat , nilai R dan R² yang diperoleh dijelaskan pada table berikut ini :

Koefisien korelasi dan koefisien Determinan untuk variabel penelitian X1, X2 dan Y

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,928a	,861	,722	233170788,20881

- a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil data didapatkan nilai korelasi sebesar 0,928 hal ini berarti terdapat hubungan antara Dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak terhadap konsumsi daerah tetapi hubungan tersebut kuat karena berada pada interval 0,9 - 1. Sedang determinan (R^2) sebesar 0,861 artinya bahwa 86,1% variasi dari konsumsi daerah dapat dijelaskan oleh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Non Pajak, sedangkan 13,9% lainnya dijelaskan oleh variabel lainnya.

Uji t (Uji Secara Parsial)

Hasil Analisis Uji t variabel Dana Bagi Hasil Pajak (X1) dan Dana Bagi Hasil Non Pajak (X 2) terhadap Konsumsi Daerah

Model	Standardized Coefficient Beta	t	Sig.
1 (Constant)		10,272	,009
X1	-1,133	-3,514	,072
X2	,699	2,169	,162

- a. Dependent Variable: Y

Untuk melihat pengaruh variabel Dana Bagi Hasil Pajak (X1) dan Dana Bagi Hasil Non Pajak (X2) terhadap Konsumsi daerah (Y) secara parsial atau sendiri sendiri, dilakukan melalui pengamatan nilai signifikan t pada tingkat α yang digunakan (penelitian menggunakan tingkat α sebesar 5 %).

Dari tabel hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat bahwa hasil uji t pada Dana Bagi Hasil Pajak diperoleh signifikansi sebesar 0,072 yang nilainya dibawah 0,05 artinya variabel Dana Bagi Hasil Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap konsumsi daerah Kabupaten Berau, Dana Bagi Hasil Non Pajak diperoleh signifikansi sebesar 0,162 yang nilainya diatas 0,05 artinya variabel Dana Bagi Hasil Non Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi daerah Kabupaten Berau.

Uji Asumsi Klasik

Terdapat 4 asumsi yang diuji yakni (1) uji normalitas nilai residu taksiran model, (2) uji heterokedastisitas, (3) uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat korelasi antar variabel bebas dalam persamaan regresi dan (4) uji Autokorelasi.

Multikolinieritas

Hasil Uji Multikolinieritas

Model	T	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance	VIF

1	(Constant	5,214	,035		
)				
	x1	-1,356	,308	,744	1,345
	x2	,704	,554	,744	1,345

Tabel diatas menunjukkan nilai toleransi yang lebih besar dari 0,1 atau nilai VIF kurang dari 5 , berarti variabel bebas diatas tidak terdapat gejala Multikolinieritas .

Uji Heterokedastisitas

Tabel dibawah ini memperlihatkan bahwa nilai standar residual rata rata menunjukkan nilai 0 (nol) sehingga disimpulkan tidak ada heterokedasitas.

Hasil Uji Heterokedasitas

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Predicted Value	2035405312,0000	2868301312,0000	2391249242,6000	410232167,49128
Residual	-228407808,00000	209686912,00000	,00000	164876645,51706
Std. Predicted Value	-,867	1,163	,000	1,000
Std. Residual	-,980	,899	,000	,707

a. Dependent Variable: Y Uji

Autokorelasi

Taabel dibawah ini memperlihatkan bahwa nilai DW sebesar 2,246 yang tergolong pada interval antara 1,66 dan 2,34 berarti tidak ada autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	,692a	,479	-,042	2,246

Uji F

Tabel Hasil Uji F

ANOVAa

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	673161724978385280,000	2	336580862489192640,000	6,191	,139b
Residual	108737232947831936,000	2	54368616473915968,000		
Total	781898957926217220,000	4			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Lebih optimal memungut pajak restoran , catering juga waralaba yang ada di Kabupaten Berau . Pemerintah daerah kususnya daerah Kabupaten Berau dapat meningkatkan pajak pertambangan kususnya tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit sehingga mendapatkan nilai yang lebih besar yang Volume 4, No.1, April 2020. Hal. 67

akhirnya dapat meningkatkan transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya kabupaten berau .

Pemerintah daerah khususnya daerah Kabupaten Berau melakukan simulasi kepada masyarakat khususnya yang bergerak dalam usaha perekonomian sehingga sadar akan kewajibannya sebagai objek pajak untuk membayarkan atau menyetorkan kewajiban perpajakannya tanpa harus ada ancaman atau denda sehingga pajak lebih dapat ditingkatkan yang pada akhirnya dapat dipergunakan untuk membiayai kebutuhan daerahnya masing – masing khususnya daerah di Kabupaten Berau .

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. M. 1993. Hadza Dinuna. Dar Al – Syuruq. Cairo
- Al-Mushlih A. & Ash-Shawi. 2004. Fiqih Ekonomi Keuangan Islam. Pustaka Daraul Haq. Jakarta.
- Akbar, Taufik. 2012. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Modal”. Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Jecson, Stepanus. 2013. Pengaruh Belanja Rumah Tangga dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan.
- Kawendar, Warsitodkk. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Semarang: Daerah

dan Akuntansi Keuangan Daerah. Universitas Diponegoro: Semarang.

- Mardiasmo. 2004. ”Akuntansi Sektor Publik”. Yogyakarta: Andi. N. Simeon. 2014. Teori Desentralisasi Fiskal. Peraturan Daerah No 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pemerintahan.
- Undang – Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang – Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah